

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN BELANJA MODAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (STUDI PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT)

IRIANTO¹⁾, BAIQ KISNAWATI²⁾, ISTIARTO³⁾, BQ.ERTIN HELMIDA⁴⁾

^{1,2,4)} Dosen STIE AMM Mataram

³⁾ Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

¹⁾irianto1301@gmail.com, ²⁾baiqkisnawati@gmail.com,

³⁾artowil@yahoo.co.id, ⁴⁾ertin0009@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten dan kota di provinsi Nusa Tenggara Barat. Jenis penelitian ini tergolong asosiatif, dimana terdapat empat variable independen (pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal) dan satu variable dependen yaitu indeks pembangunan manusia. Populasi penelitian ini adalah laporan keuangan pemetintah daerah yang terdiri dari sepuluh kabupaten/kota dalam kurun waktu tujuh tahun dari tahun 2013-2019, sehingga jumlah populasi sebanyak 70. Data yang digunakan dalam peneltian ini berupa data skunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia sedangkan dana alokasi khusus dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Secara simultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal berpengaruh terhadap indeks pembangnunan manusia.

Kata kunci: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja modal, indek pembangunan manusia.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of local revenue, general allocation funds, specific allocation funds, and capital expenditures on the human development index in districts and cities in West Nusa Tenggara province. This type of research is classified as associative, where there are four independent variables (local revenue, general allocation funds, special allocation funds and capital expenditures) and one dependent variable, namely the human development index. The population used was local government financial reports consisting of ten districts / cities in a period of seven years from 2013-2019 (total population used was 70). The data used in this research were secondary data. The data analysis used were multiple regression analysis. The results showed that partially the original regional income and general allocation funds had an effect on the human development index, while the special allocation funds and capital expenditures had no effect on the human development index. Simultaneously local revenue, general allocation funds, special allocation funds and capital expenditures affect the human development index.

Keywords: local revenue, general allocation funds, special allocation funds, capital expenditures, human development index.

PENDAHULUAN

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indicator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengatur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup (Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik BPS,2019).

Menurut *United Nation Development Programme* (UNDP) pembangunan manusia (*human development*) merupakan upaya untuk menciptakan/memberikan perluasan pilihan bagi penduduk. Konsep pemikiran ini terbentuk dari pemahaman bahwa pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan atau system social kearah yang lebih baik yang dimaknai dengan adanya kemajuan atau perbaikan, pertumbuhan dan diversifikasi . Perluasan pilihan penduduk yang dimaksud meliputi pilihan untuk berumur panjang dan hidup sehat., berilmu pengetahuan, mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak, memiliki kebebasan untuk berpolitik, serta jaminan perlindungan atas hak asasi manusia dan harga diri (PGSP dalam Damayanti, 2014:19)

Konsep pembangunan manusia seutuhnya merupakan konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental maupun secara spritual. Bahkan secara eksplisit disebutkan bahwa pembangunan yang dilakukan menitik beratkan pada pembangunan sumber daya manusia yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara. Suatu negara di katakan maju bukan saja dihitung dari pendapatan domestik bruto saja tetapi juga mencakup aspek harapan hidup serta pendidikan masyarakatnya karena pembangunan suatu negara tidak bisa dikatakan berhasil apabila hanya melihat dari besarnya pendapatan domestic bruto saja tanpa meningkatkan pembangunan manusianya. Modal manusia (*human capital*) merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi karena pencapaian pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari kualitas *human capital*nya. Dengan modal manusia yang berkualitas kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik. Kualitas modal manusia ini misalnya dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, ataupun indikator-indikator lainnya. Sering kali tingginya pendapatan domestik bruto suatu negara tidak diimbangi dengan tingkat pembangunan manusia, hal ini pada akhirnya dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat yang diakibatkan oleh kesenjangan tingkat ekonomi masing-masing kelompok masyarakat.

Pembangunan kesehatan dan pendidikan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pengukuran IPM, kesehatan dan pendidikan adalah salah satu komponen utama selain pendapatan, karena kesehatan serta pendidikan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan manusia merupakan hal yang mutlak dilakukan guna mencetak sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan pembangunan. Dengan sumber daya manusia yang baik dan memadai maka pelaksanaan pembangunan akan semakin lancar dalam berbagai sektor. Dibutuhkan kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan kualitas SDM. Pemerintah hendaknya memperhatikan hal tersebut terlebih jika memandang manusia merupakan subjek dan objek pembangunan, sehingga pembangunan manusia yang kemudian menunjang pembangunan di berbagai sektor akan mewujudkan kesejahteraan bagi manusia yang berada dalam wilayah pemerintahan tersebut. Pembangunan manusia merupakan hal yang penting terutama bagi sebagian negara khususnya negara yang sedang berkembang hal ini disebabkan oleh karena banyak negara dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi namun gagal dalam menghadapi masalah kesenjangan sosial dan meningkatnya kemiskinan, selain itu pembangunan manusia sebenarnya merupakan investasi tidak langsung terhadap pencapaian tujuan perekonomian nasional.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Nusa Tenggara Barat menduduki peringkat 29 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia atau 6 terendah dari bawah setelah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat dan Kalimantan Barat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Nusa Tenggara Barat dari tahun 2018-2019 capainnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 capaiannya 67,30 sedangkan tahun 2019 capainnya 68, 14 atau terjadi pertumbuhan sebesar 1,25 %. Namun capaian ini masih dalam katagori sedang menurut standar UNDP bahwa IPM terdiri dari 4 kriteria yakni: (BPS 2020)

- a. Katagori sangat tinggi (>80)
- b. Katagori tinggi (70-79)
- c. Katagori sedang (60-69)
- d. Katagori rendah (<60)

Nusa Tenggara Barat terdiri dari 8 Kabupaten dan 2 Kota yang IPM rata-rata berada pada katagori sedang seperti tertera pada tabel berikut :

**Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi NTB
Tahun 2013-2018**

No	Kabupaten/Kota	IPM Kabupaten/Kota NTB						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kabupaten Lombok Barat	62.91	63.52	64.62	65.55	66.37	67.18	68.03
2	Kabupaten Lombok Tengah	61.25	61.88	62.74	63.22	64.36	65.36	66.36
3	Kabupaten Lombok Timur	61.43	62.07	62.83	63.7	64.37	65.35	66.23
4	Kabupaten Sumbawa	62.44	62.88	63.91	64.89	65.84	66.77	67.60
5	Kabupaten Dompu	63.16	63.53	64.56	65.48	66.33	66.97	67.83
6	Kabupaten Bima	62.08	62.61	63.48	64.15	65.01	65.62	66.37
7	Kabupaten Sumbawa Barat	66.86	67.19	68.38	69.26	70.08	70.71	71.52
8	Kabupaten Lombok Utara	59.2	60.17	61.15	62.24	63.04	63.83	64.49
9	Kota Mataram	75.22	75.93	76.37	77.2	77.84	78.43	79.10
10	Kota Bima	71.72	72.23	72.99	73.67	74.36	75.04	75.80

Sumber: BPS, 2020

Menurut BPS (2020) ada beberapa komponen yang digunakan dalam pembentukan indeks pembangunan manusia yakni indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran. Dari komponen-komponen tersebut maka dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia tentunya akan terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal.

Menurut UU RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun sumber-sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah seperti hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Sumber lain dari pendapatan daerah selain PAD adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Dana alokasi umum merupakan bagian dari dana perimbangan. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Yang dimaksud dengan celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Adapun tujuan dari pada DAU adalah untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relative kecil. Sebaliknya daerah yang potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relative besar. Secara implisit prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

Dana Alokasi Khusus (DAK) juga merupakan bagian dari dana perimbangan. Besaran DAK setiap tahun ditetapkan dalam APBN. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. DAK bertujuan untuk membantu kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik maka keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan dan bermafaat untuk masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD. Salah satu dari pengeluaran dari pemerintah daerah adalah belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi meliputi antara lain untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, asset tak berwujud. Menurut Halim (2002:72) belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang akan menambah asset atau kekayaan daerah, belanja modal merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yaitu dengan menyediakan fasilitas yang bersinggungan langsung dengan pelayanan public.

Putra dan Ulupui (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PAD, DAU dan DAK berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. Sari dan Supadmi (2016) dalam penelitiannya berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PAD dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan pada peningkatan indeks pembangunan manusia. Williantara dan Budiasih (2016) dalam penelitiannya berjudul Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pada Indeks Pembangunan Manusia. Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan Dana Bagi Hasil tidak mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan DAK berpengaruh negatif pada IPM. Setiawan dan Budiana (2015) dalam penelitiannya berjudul pengaruh belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variable intervening Provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Komariah, dkk (2019) dalam penelitiannya berjudul Pengaruh Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial belanja modal tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap IPM

Rumusan Masalah

Dari latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ?.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu ingin mengetahui bagaimanakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan manfaatnya sebagai pendambah wawasan penulis, pembaca serta sebagai referensi dalam bidang terkait.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini tergolong penelitian asosiatif karena menghubungkan suatu variable dengan variable lainnya. Penelitian Asosiatif adalah penelitian yang bertujuan mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih. (Sugiyono, 2017: 63). Dalam hal ini ada 4 variable independen yang akan dihubungkan dengan variable dependen. Variabel independen tersebut terdiri dari PAD (X1), DAU (X2), DAK (X3) dan Belanja Modal (X4). Variabel-variabel tersebut akan dihubungkan dengan variable dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia (Y).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2017: 476). Jadi, teknik pengumpulan data dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dalam penelitian ini dokumen yang dibutuhkan adalah data Indeks Pembangunan Manusia diperoleh dari BPS. Demikian pula data PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal berupa laporan realisasi anggaran untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga diperoleh dari BPS

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota yang ada di Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari 8 Kabupaten (Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Utara) dan 2 Kota (Kota Mataram dan Kota Bima), Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini selama 7 tahun mulai tahun 2013-2019. Jadi jumlah populasinya adalah 70. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif sedangkan sumber datanya data sekunder, dalam hal ini menggunakan data dari laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2013-2019 dan data indeks pembangunan manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Operasional Variabel

Penelitian ini terdiri dari satu variable terikat (dependen) yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan empat variable bebas (independen) yaitu PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal. Secara operasional indicator untuk mengukur masing-masing variable adalah sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM= Y)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga

dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Untuk mendapatkan data mengenai Indeks pembangunan Manusia (IPM) 8 Kabupaten dan 2 Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa diakses langsung melalui <https://ipm.bps.go.id/data/provinsi/metode/baru/5200>.

2. Pendapatan Asli Daerah (X1)

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indikator untuk mengukur PAD dalam hal ini adalah dengan menjumlahkan semua penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah; Retribusi Daerah; hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan PAD yang sah.

3. Dana Alokasi Umum (X2)

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini hasil penghitungan untuk per kabupaten dan kota ditetapkan dengan keputusan presiden. Jumlah DAU yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaannya.

4. Dana Alokasi Khusus (X3)

Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah. DAK yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaannya.

5. Belanja Modal (X4)

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Indikator untuk mengukur belanja modal adalah dengan menjumlahkan seluruh belanja modal yang terdiri dari: Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda (*Multiple Regression Analysis*). Analisis regresi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini persamaan yang akan diuji adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Persamaan regresi linear berganda untuk variabel tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut : (Sugiyono, 2017:305).

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Dimana :

Y = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

a = Konstanta

X₁ = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X₂ = Dana Alokasi Umum (DAU)

X₃ = Dana Alokasi Khusus (DAK)

X₄ = Belanja Modal (X4)

b₁, b₂, b₃ = koefisien X₁, X₂, X₃,

e = variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Agar penggunaan analisis regresi ini tidak bias perlu dites agar tidak terjadi pelanggaran terhadap asumsi tersebut yang disebut dengan uji asumsi klasik yaitu uji multikolinieritas, normalitas, autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. (Ghozali, 2011: 105).

Uji Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2011: 101) Uji t-test digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial. Dasar pengambilan keputusan digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas signifikansi > 0,05, maka hipotesis ditolak. Hipotesis ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai probabilitas signifikansi < 0,05, maka hipotesis diterima. Hipotesis tidak dapat ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2011: 98) Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas signifikansi > 0,05, maka hipotesis ditolak. Hipotesis ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai probabilitas signifikansi < 0,05, maka hipotesis diterima. Hipotesis tidak dapat ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinan (R²)

Menurut Ghozali (2011: 97) koefisien determinasi (R²) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan pada kabupaten/kota dan indeks pembangunan manusia di propinsi nusa tenggara barat selama tujuh tahun dari tahun 2013-2019 yang dijadikan sampel. Sebelum dilakukukan analisis regresi linear berganda terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Uji Multikolonieritas dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), uji autokorelasi dilakukan dengan Uji Durbin-Watson (DW test), uji normalitas dilakukan dengan analisis statistik yaitu uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (Uji K-S) sedangkan uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik plot. Dari hasil uji asumsi klasik menunjukkan tidak terjadi multikolonieritas, autokorelasi, maupun heteroskedastisitas. Demikian pula dalam uji normalitas tampak terdistribusi normal.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolonieritas Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	70.988	1.970		36.033	.000		
X1	2.556E-8	.000	.485	3.517	.001	.548	1.826
X2	-1.476E-8	.000	-.722	-4.906	.000	.481	2.079
X3	4.079E-9	.000	.120	.658	.513	.315	3.176
X4	4.763E-9	.000	.094	.542	.590	.345	2.898

a. Dependent Variable: Y

Hasil uji multikolonieritas untuk variable PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal menunjukkan nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas

Tabel 3. Nilai Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.480 ^a	.230	.182	.03681	1.812

a. Predictors: (Constant), LnX4_d, LnX2_d, LnX3_d, LnX1_d

b. Dependent Variable: LnY_d

Nilai Durbin-Watson menunjukkan angka sebesar 1.812, setelah dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi 5 % dengan jumlah sampel 70 (n) dan jumlah variabel independen 4

(k=4), dalam tabel Durbin-Watson diperoleh angka (du) sebesar 1.735. Karena nilai Durbin-watson terletak antara $du < 1.812 < 4 - du$, maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

**Tabel 4. Nilai Uji Normalitas.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.12918129
Most Extreme Differences	Absolute	.106
	Positive	.093
	Negative	-.106
Test Statistic		.106
Asymp. Sig. (2-tailed)		.074 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,074 (lebih besar dari 0,05) sehingga bisa dilakukan regresi dengan model linear berganda. Ini berarti data residual terdistribusi normal.

Dari rumusan masalah yang dikemukakan dalam latar belakang bagaimanakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 70.988 + 2.556E-8 X_1 - 1.476E-8 X_2 + 4.079E-9 X_3 + 4.763E-9 X_4$$

Dari persamaan regresi tersebut nilai konstanta menunjukkan angka sebesar 70.988, ini berarti secara rata-rata variable diluar model Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten/kota di propinsi nusa tenggara barat tergolong katagori tinggi karena nilai IPM berkisar antara 70 – 79 meskipun variable independennya sama dengan nol. Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, dari hasil pengolahan data secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini ditunjukkan oleh nilai sig 0,001<0,05. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini ditunjukkan oleh nilai sig 0,00<0,05. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena nilai sig lebih besar dari 0,05 dengan masing-masing nilai sig sebesar 0,513 dan 0,590. Hasil analisis data menunjukkan ternyata hanya 18,2 % indeks pembangunan manusia dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal sedangkan 91,8 % di pengaruhi oleh variable lain. Secara simultan PAD, DAU, DAK, dan belanja modal berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia seperti ditunjukan pada uji F pada tabel berikut :

Tabel 5. Hasil Uji Simultan (Uji F)

<i>ANOVA^a</i>						
<i>Model</i>		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	Regression	547.575	4	136.894	7.718	.000 ^b
	Residual	1152.845	65	17.736		
	Total	1700.420	69			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa hasil analisis menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manuisa (IPM), hal ini berarti bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan mengalami peningkatan jika PAD terus mengalami peningkatan. Jadi jika PAD terus mengalami peningkatan maka IPM juga akan mengalami peningkatan. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Ulupui (2015), Sari dan Supadmi (2016) . Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Williantara dan Budiasih (2016). Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ini menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai kegiatannya masih tinggi. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Ulupui (2015). Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Williantara dan Budiasih (2016). Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Williantara dan Budiasih (2016) namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Putra dan Ulupui (2015) . Belanja modal tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Komariah dkk (2019) tapi tidak sejalan dengan penelitian Sari dan Supadmi (2016), Setiawan dan Budiana (2015).

PENUTUP

Simpulan

Dari rumusan masalah yang dikemukakan dan berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Povinsi Nusa Tenggara Barat yang menduduki peringkat 29 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia atau 6 terendah dari bawah setelah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat dan Kalimantan Barat.

Saran

Diharapkan pemerintah daerah Kabupaten/Kota agar terus menerus menggali sumber daya yang ada sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Diharapkan pula untuk yang akan datang pemerintah kabupaten dan kota mampu menambah pengeluaran untuk belanja modal guna meningkatkan indeks pembangunan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2019). *Data Indeks Pembangunan Manusia pada Provinsi-provinsi di Indonesia* diunduh di <https://www.bps.go.id> (diakses Rabu, 15 Januari 2020).
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM. SPSS 19 (edisi kelima.)*. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Halim, Abdul (2002). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat
- Komariah,D., Yogiartoro,M., Hukom,A.,(2019).*Pengaruh Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia*.ISSN:2581-2165. Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT Vol.4,No.S1(Desember,2019) 523-532.
- Putra,P.Gd.M. dan Ulupui, I.Gst.Kt.A. (2015). *Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia*. ISSN : 23028556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 11.3 (2015) : 863-877
- Republik Indonesia. (2004). UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Sari,Ida Ayu C.Y. dan Supadmi, Ni Luh (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia*. ISSN: 2302--8556 E--Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.15.3. Juni (2016): 2409--2438
- Setiawan,Gst.Bgs.K.P. dan Budiana Dewa Nyoman (2015). *Pengaruh Belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variable Intervening di Provinsi Bali*. E-Jurnal EP Unud, 4 [10] : 1276-1303 ISSN: 2303-017.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta: Bandung
- Williantara,Gd.F. dan Budiasih, I Gst. Ayu Nyoman (2016) *Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pada Indeks Pembangunan Manusia*. ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16.3. September (2016): 2044-2070